

Melibatkan Diri dalam Permainan Kuasa: Eksplorasi Etika Politik Melalui Lensa Tradisi *Mangain* terhadap Elit Politik

Kevin Nathanael Marbun¹

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia
Kevinnathanaelmarbun@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menguraikan mengenai beberapa fenomena terkait dengan tradisi *mangain* (pemberian marga) terhadap beberapa aktor politik atau politisi oleh beberapa perkumpulan marga dengan analisis menggunakan literatur etika politik dari fenomena tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat aspek etika politik dari pemberian marga terhadap aktor politik atau politisi dengan melihat dimensi politis yang diharapkan dari pemberian marga tersebut. Tinjauan literatur yang digunakan adalah dimensi etika politik yang terdiri dari sarana, tujuan, dan aksi politik. Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara terhadap tokoh adat dan data sekunder melalui studi pustaka yang relevan terhadap artikel ini. Hasil dari penelitian ini bahwa pemberian marga dari sisi dimensi etika politik yaitu: Sarana, kelompok marga sebagai sarana politisi untuk kemudian mengagregasi kepentingan politiknya di samping kelompok marga juga mempunyai kepentingan terhadap kelompok marganya. Tujuan, pemberian marga bertujuan untuk kepentingan kelompok, kebanggaan, dan popularitas marga. Aksi Politik, dimana untuk melancarkan tujuan tersebut, pemberian marga menjadi salah satu cara untuk memperoleh tujuan-tujuan tersebut. Selain itu, pemberian marga merupakan salah satu tradisi yang sakral sehingga dalam hal ini pemberian marga harus didasari oleh pertimbangan nilai luhur yang kuat bukan hanya didasari oleh kepentingan politis sesaat.

Kata Kunci: Pemberian Marga, Etika Politik, Dimensi Etika Politik, Kepentingan Elektoral.

ABSTRACT

This article describes several phenomena related to the mangain tradition (giving surnames) to several political actors or politicians by several clan associations with an analysis of the political ethics of these phenomena. The purpose of this study is to look at the political ethical aspects of the granting of surnames to political actors or politicians by looking at the expected political dimensions of the granting of the surname. The literature review used is the dimension of political ethics which consists of means, goals, and political action. The method used in this article uses qualitative methods with data collection techniques through primary data by interviewing traditional leaders and secondary data through literature study relevant to this article. The results of this study are that the granting of clans from the political ethical dimension is: Means, clan groups as a means for politicians to then aggregate their political interests besides clan groups also have interests in their clan groups. The purpose of giving a surname is for the benefit of the group, pride, and popularity of the clan. Political Action, where to expedite these goals, the granting of a surname is one way to obtain these goals. In addition, the granting of surname is one of the sacred traditions, so in this case the granting of surname must be based on strong noble value considerations, not only based on momentary political interests.

Keywords: Grant of surname, Political Ethics, Dimensions of Political Ethics, Electoral Interests

LATAR BELAKANG

Tradisi pemberian marga bagi orang disuku batak umumnya disebut dengan *Mangain* atau *Mangampu* atau mengangkat. Tradisi ini dilakukan untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai marga Batak. Tujuan lain dari tradisi ini adalah mempererat interaksi masyarakat untuk kemudian tidak terputus. Setelah tradisi tersebut dilalui maka seseorang yang tadinya bukan Batak disebut sah menyandang salah satu marga Batak. Proses dari *Mangain* ini diawali dengan adanya musyawarah di antara unsur *Dalihan Natolu* yang terdiri dari *Dongan Tubu*, *Boru*, dan *Hula-hula* juga *Dongan Sahuta* (orang yang berada pada satu kampung). Lalu, pada acara adatnya akan ada prosesi dimana keluarga kemudian mendatangi *hula-hula* dengan membawa makanan khas lalu meminta seseorang yang hendak diberi marga diangkat oleh *hula-hula*. Kemudian terdapat bagian penyerahan uang atau *pisopiso* atau *pasituak natonggi* yang kemudian dibagikan kepada *hula-hula*. Dan terakhir, seseorang tersebut dianggap sah menjadi anak/boru dari keluarga yang mengangkat (DEI FM, 2022).

Beberapa fenomena yang terjadi ke belakang, ketika politisi atau aktor politik mendapat marga dari beberapa perkumpulan marga tertentu yang mana hal tersebut sekilas tidak salah dan dikatakan sah-sah saja, namun hal tersebut juga tidak sedikit menimbulkan kontra melihat hal tersebut adalah sesuatu yang sakral sehingga tidak menjadi hal yang mudah serta penuh pertimbangan ketika seseorang mendapat atau diberikan marga batak. Budayawan Batak, Mangatas Pasaribu saat wawancaranya mengatakan bahwa pemberian marga adat batak merupakan sesuatu yang besar dan sakral dimana sebelum pemberian marga seharusnya terdapat orang tua yang mengangkat orang itu sebagai anaknya (detikNews, 2011).

Beberapa aktor politik atau politisi yang mendapatkan marga tersebut dapat dilihat dari sajian tabel berikut ini:

Tabel 1. Aktor Politik atau Politisi yang Mendapatkan Marga

No	Nama Tokoh	Jabatan	Marga	Keterangan
1	Erick Thohir	Menteri BUMN	Sidabutar	Penyematan marga tersebut pada acara Tao Toba Heritage Fest (2022) <i>“Sebagai orang batak, dirinya (Erick Thohir) akan membantu kampung halamannya”</i> (liputan6.com, 2022b)
2	Henry Indraguna	Advokat & Politisi Golkar	Purba	Pemberian marga ini dikarenakan Henry dianggap berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan masyarakat Batak Karo (2021) <i>“Setelah diangkat dan diberi marga Purba, saya (Henry) dianggap sebagai bagian dari keturunan sah dan berhak menyandang marga Purba di Batak Karo”</i> (suarakarya.id, 2021)
3	H. Muhamad	Calon Walikota Tangerang Selatan	Ginting	Pemberian Marga tersebut sebagai dukungan Elemen Masyarakat Karo (2020) <i>“Saya (Muhamad) sangat berterimakasih kepada masyarakat Karo di Tangsel yang mendukung saya bahkan memberikan marga Ginting kepada saya”</i> (lampuhijau.co.id, 2020)
4	AA LaNyalla Mahmud Mattalitti	Ketua DPD RI	Sitepu	Pemberian marga Sitepu dilakkan pada saat kunjungan kerja ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara (2020) <i>“Saya (La Nyalla) sangat berterimakasih telah mendapatkan saudara baru di Kabupaten Karo. Sepertinya saya harus lebih sering ke sini”</i> (republika.co.id, 2020)
5	Arsyadjuliandi Rachman	Calon Gubernur Riau	Simamora	Pemberian marga tersebut sebagai dukungan terhadap pasangan calon nomor 4 Arsyadjuliandi Rachman-Suyanto (2018) <i>“Karena sudah menjadi bagian dari keluarga, saya (Arsyadjuliandi) yakin pasti bapak-ibu bantu saya. Kalau ingin saya tetap jadi gubernur, sampaikan kepada keluarga, tetangga yang lain. Sesama keluarga harus saling bantu”</i> (bermadah, 2018)
6	Joko Widodo	Presiden	Siregar	Setelah Kahiyang Ayu (Putri Presiden Jokowi) secara otomatis Jokowi menerima marga Siregar (2017) <i>“Sekarang saya sudah menjadi keluarga besar Batak setelah putri saya Kahiyang bersuamikan Nasution dan menerima marga Siregar”</i> (tribunnews.com, 2017)

7	Agus Harimurti Yudhoyono	Ketua Umum Partai Demokrat	Simanjuntak	AHY hadir dalam peresmian pembangunan Tugu Makam Raja Simanjuntak (2022) <i>“saya ucapkan terimakasih atas sambutan seluruh warga desa. Saya sangat bersyukur dan bangga menjadi keluarga simanjuntak”</i> (liputan6.com, 2022a)
8	Prabowo Subianto	Ketua Umum Partai Gerindra & Calon Wakil Presiden (2009)	Lumban Tobing	Calon Wakil Presiden Subianto secara resmi berhak menyandang marga Lumban Tobing (2009) <i>“Ayah saya dari Jawa Tengah, ibu dari Sulawesi Utara, dan sekarang saya hadir di Medan untuk diterima dalam keluarga besar Lumban Tobing...”</i> (detiknews.com, 2009)

Sumber: Hasil Olah Data oleh Penulis (2023)

Dari beberapa contoh di atas, pemberian marga kepada politisi sekilas tidak menjadi suatu masalah karena terdapat pertimbangan-pertimbangan yang diberikan untuk kemudian memutuskan hal tersebut. Namun, jika dilihat dari sisi fenomena dimana beberapa pemberian marga tersebut terkesan politis dan berada pada musim-musim pemilihan atau kontestasi politik. Hal ini lah yang menjadi suatu perdebatan bagi beberapa pihak dimana pemberian marga seharusnya menjadi suatu acara yang sakral sehingga butuh pertimbangan dan persyaratan yang lebih matang lagi untuk kemudian menyematkan marga pada individu tertentu.

Politik etnis dalam hal ini mengacu kepada suku, dapat dilihat pada situasi dimana politisi cenderung memobilisasi dukungan atas dasar ketertarikan terhadap identitas etnis dan juga masyarakat yang cenderung mendukung suatu pemimpin. Politik etnis sering kali dipandang sebagai suatu masalah ketika berbagai kelompok melihat satu sama lain sebagai pesaing dalam memperoleh kekuasaan. Terdapat kekhawatiran apabila anggota dari kelompok etnis dikecualikan dari manfaat bantuan dan perlindungan negara jika mereka tidak berkuasa (Lynch, 2015).

Salah satu tokoh muda masyarakat Batak, Viktor Sirait mengatakan dalam wawancaranya pada tagar.id *“jangan politisasi suku (Batak), tidak etis, ini berbahaya membawa-bawa serta mengklaim atas nama suku mendukung salah satu calon”*. Hal ini dilontarkan pada saat Pilkada di DKI Jakarta dimana salah satu kelompok Batak memberikan dukungan terhadap salah satu calon (tagar.od, 2017). Tulisan ini akan membahas mengenai pemberian marga ditinjau dari sisi etika politik. Akar dari munculnya tulisan ini adalah mengkaji beberapa fenomena politik terkait dengan pemberian marga yang mana literatur kajian dari penelitian sebelumnya belum banyak membahas mengenai fenomena ini. Beberapa kajian yang ada umumnya membahas mengenai pemberian marga terhadap individu non-Batak dari sisi

budaya khususnya perkawinan seperti: (Ammar et al., 2023; Atmawarni et al., 2022; Pane & Yasir, 2020; Parapat & Aritonang, 2019).

Etika Politik bukan hanya berkaitan dengan perilaku para politisi melainkan bersangkutan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, budaya, politik, serta ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa etika politik juga berkaitan dengan seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat (Handoyo et al., 2016). Sebelum membahas lebih dalam beserta analisisnya, tradisi pemberian marga *mangain* berkaitan erat atau sering ditemui dalam pernikahan Batak dimana terjadi pertemuan antara pasangan yang berasal dari non-Batak sehingga diberikan marga yang dilalui dengan serangkaian adat. Pemberian marga tersebut dikaitkan agar mendapat pengakuan di dalam keluarga serta adat dan juga terdapat posisi pada *Dalihan Na Tolu* yang mana jika marga tersebut kemudian tidak diberi maka akan menimbulkan dampak salah satunya tidak diakui dalam adat (Marbun & Silas, 2022; Windi, 2021).

Pemberian dari marga dalam adat Batak tentu saja bukan hanya berkaitan dengan teman ataupun sahabat atau istilahnya di “naturalisasikan” menjadi seseorang yang bermarga sehingga proses pemberian marga tersebut ada dalam upacara adat khusus dan hukumnya (orang yang diberi marga) sama kuat keanggotaannya berdasarkan pertalian darah (Hutabalian, 2014). Beberapa literatur menjelaskan bahwa marga menjadi suatu yang penting sebagai eksistensi seseorang dalam lingkungan sosial masyarakat (Sinaga et al., 2014). Selain itu, marga menjadi suatu simbol kekerabatan serta perannya dalam pergeseran status sosial masyarakat sehingga ikatan tersebut dijadikan sebagai salah satu simbolisasi (Hasan et al., 2022). Selain eksistensi atau pengakuan, marga juga menjadi satu titik dalam menentukan yang paling dihormati dalam adat batak (Hutabalian, 2014). Artikel ini mencoba untuk menjawab pertanyaan terkait dengan fenomena pemberian marga kepada politisi ditinjau dari sisi etika politik sehingga perdebatan sah atau tidak sah tergantung kepada prinsip yang memandangnya namun tulisan ini akan mencoba membahas terkait dengan etika politik dan kepentingan yang dihasilkan atau diharapkan dari pemberian marga tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan tentang Etika Politik

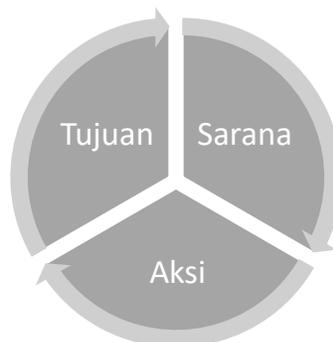
Etika Politik mempertanyakan mengenai tanggung jawab serta kewajiban manusia. Oleh karena itu, individu manusia hidup bersama-sama dengan orang lain sehingga terdapat etika sosial dalam tatanan masyarakat. Bertolak dari martabat manusia sebagai suatu pribadi yang sosial, etika sosial membahas norma yang seharusnya menentukan sikap ataupun tindakan dalam suatu relasi sosial antar manusia. Termasuk dalam wilayah tersebut adalah etika politik yang berbicara mengenai dimensi politis kehidupan manusia. Etika politik berbicara mengenai kebaikan sebagai manusia bukan hanya sebagai warga negara melainkan terhadap

negara (Suseno, 1994). Dalam hal ini jika dikaitkan dengan praktis maka etika politik mempertanyakan bagaimana manusia harus bersikap terhadap sesuatu yang ada (Kaelan, 2002).

Dalam suatu perspektif etika politik, manusia memiliki dimensi politis yang dapat dikaji ke dalam tiga hal. *Pertama*, manusia sebagai makhluk sosial yang dipahami dalam arti keseimbangan dimana manusia mempunyai kebebasan menurut kehendaknya namun akan mempunyai arti ketika berada di tengah masyarakat. *Kedua*, manusia dengan dimensi kesosialannya dimana dalam arti ini dapat dinyatakan ke dalam tiga hal yaitu (a) dalam penghayatan spontan individual; (b) berhadapan dengan lembaga-lembaga, (c) melalui pengertian simbolis terhadap realitas. *Ketiga*, terkait dengan dimensi politis kehidupan manusia berfungsi dalam rangka kehidupan manusia dimana negara berkaitan dengan politik sehingga terjadi pertarungan kekuatan dimana etika sebagai suatu prinsip murni yang diatur terhadap imperatif moral (Suseno, 1994).

Etika politik dalam dimensi politis diartikan sebagai suatu praktik dalam melakukan penilaian etis terhadap tindakan politik. Tujuan yang dikejar oleh etika politik dalam dimensi ini adalah mengarahkan manusia kepada suatu kehidupan yang baik dalam rangka memperluas lingkup kebebasan (Thompson, 2000). Berbicara mengenai dimensi politik, etika politik mempunyai tiga dimensi yaitu tujuan, sarana, serta aksi politik. Dimensi tujuan mengandaikan terhadap pencapaian kesejahteraan serta hidup damai didasarkan pada kebebasan serta keadilan. Dimensi sarana berbicara mengenai pencapaian tujuan yang meliputi prinsip dasar pengorganisasian praktik. dan dimensi aksi politik berbicara mengenai tindakan politik yang mana hal ini berbicara rasionalitas politik yang mengandaikan kemampuan dalam mempersepsi kepentingan berdasarkan peta politik yang ada (Haryatmoko, 2003). Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Dimensi Etika Politik



Sumber: Olah Data dari Haryatmoko (2003)

Tinjauan tentang Tradisi *Mangain* (Pemberian Marga) pada Suku Batak

Tradisi mangain atau pemberian marga merupakan suatu pengukuhan dari pihak *pengain* (pihak yang akan diberi marga) untuk kemudian menjadi orang tua wali dari yang di *ain*. *Mangain* tidak dapat disama artikan sebagai suatu adopsi dengan melaksanakan pemberian marga dimana dalam adat Batak, peresmian marga tersebut merupakan suatu bentuk bagian dari Persekutuan marga yang dipilihnya sehingga terdapat dua konsekuensi hukum yaitu sejak pemberian marga secara formal yang non-batak melekat dalam dirinya kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama (Pane & Yasir, 2020).

METODE

Pada artikel ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui dua cara yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2015). Data primer dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa tokoh adat atau yang menjadi pemuka adat dalam perkumpulan marga tertentu dengan pertimbangan bahwa tokoh adat tersebut akan ditanyakan mengenai pandangan terhadap fenomena pemberian marga kepada aktor politik/politisi dari sisi adat serta dimintakan pendapatnya soal etis tidak etisnya tindakan tersebut. Dan terakhir, tokoh adat dimintai pandangan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemberian marga. Dari hal tersebut, peneliti menentukan teknik penentuan informan dengan teknik *purposive* dengan teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber. Kemudian, data sekunder yang diambil dari berita, jurnal, buku, dan beberapa rujukan lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Kebutuhan Data Penelitian

No	Sumber Data	Kebutuhan Data	Informan/ Sumber Data
1	Data Primer (Wawancara) via telfon seluler	<ul style="list-style-type: none"> Pandangan terhadap fenomena pemberian marga kepada aktor politik/politisi dari sisi adat Pandangan Etis/Tidak Etis dari sisi adat terhadap fenomena pemberian marga kepada aktor politik/politisi Pandangan terhadap tujuan dari pemberian marga tersebut dari dimensi politik. Tradisi pemberian marga pada adat Batak. 	Tokoh Adat/Pemuka Adat/Pengurus Organisasi Marga (3 Orang)

2	Data Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Literatur Etika Politik, Dimensi Etia Politik. • Literatur Tradisi <i>Mangain</i> pada Adat Batak. • Aktor politik/politisi yang diberikan marga. • Tanggapan tokoh atau pengamat adat terkait fenomena tersebut. 	Buku dan Jurnal yang relevan, Berita Online
---	----------------------	--	---

Sumber: Peneliti (2023)

HASIL DAN DISKUSI

Isu Politisasi Marga dalam Strategi Elektoral Elit

Dalam berapa kasus, khususnya berkaitan dengan musim kontestasi politik sudah menjadi hal umum ketika kemudian para pasangan calon mengadakan pendekatan terhadap masyarakat. Tak terkecuali pada suku Batak, para kontestan berlomba-lomba untuk kemudian memperoleh suara dari semua kalangan baik berbasis etnis, agama, atau ras dan bahkan seluruh elemen masyarakat guna memantapkan kemenangan. Salah satu fenomena yang umum terlihat sekarang-sekarang ini adalah tradisi pemberian marga yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai bagian dari dukungan terhadap kontestan.

Banyak pengurus dari marga Batak secara terang-terangan membuat pernyataan terhadap dukungan dari marga yang mana tidak sedikit juga yang mengatasnamakan kelompok tertentu namun membawa identitas marga di dalamnya. Umumnya diadakan acara khusus yang dibungkus dengan kegiatan adat dengan memberi simbolisasi terkait dengan adat satu suku tersebut. Bahkan beberapa marga berlomba-lomba memberikan marga terhadap figur-figur populer dengan beberapa alasan: *Pertama*, diharapkan dengan pemberian marga tersebut dapat memberikan keuntungan secara politis terhadap marga tersebut. *Kedua*, marga tersebut semakin populer akibat penyematan marga kepada tokoh tersebut akan membawa popularitas terhadap marga tertentu. Hal yang sama diungkapkan oleh informan: Pada saat ini, marga-marga berlomba memberikan marga kepada politisi dalam konteks politik sebagai bagian agar marga itu semakin dikenal karena figur tersebut memiliki popularitas yang tinggi, ada kebanggaan tersendiri. Informan lain juga mengatakan hal yang serupa dimana kebanggaan bagi satu marga ketika marganya dipakai oleh figur tertentu seperti presiden atau menteri juga figur lainnya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa fenomena pemberian marga dalam konteks politik memberi suatu warna tersendiri dalam hal popularitas marga dan juga harapan terhadap keuntungan-keuntungan politik. Dalam sisi etika politik, dimensi ini adalah

apa yang dikatakan dengan tujuan bahwa terdapat satu kepentingan yang kemudian diharapkan dapat diperoleh dengan tindakan tertentu. Dalam kajian yang dilakukan oleh Manurung (2010) menyebutkan bahwa latar belakang pemberian marga diakibatkan karena adanya maksud dalam mendekati diri pada suatu masyarakat tertentu untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh dalam menjalin hubungan emosional.

Studi lainnya juga menyebutkan hal yang sama dimana marga dijadikan sebagai suatu isu politik yang dipolitisasi dalam menyusun strategi elektoral elit pada kontestasi politik. Tambunan & Karim menyebutkan bahwa terdapat tiga hal terkait dengan berkembangnya isu marga dalam politik elektoral seperti: *Pertama*, dipengaruhi oleh berkembangnya liberalisasi politik yang berdampak terhadap perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik otoritarian menjadi desentralistik demokratis. *Kedua*, dipengaruhi oleh warisan ideologis dengan budaya *Dalihan Na Tolu* yang melahirkan nepotisme marga dalam masyarakat. *Ketiga*, dipengaruhi oleh masifnya politisasi serta instrumentasi marga oleh elit politik.

Dalam hasil temuan Azhar (2017) juga mengungkapkan bahwa dalam kontestasi politik misalnya isu yang kemudian muncul dalam etnis Batak adalah terkait isu kesamaan marga dan juga isu asal daerah, dan putra daerah tertentu. Dari pandangan tersebut bahwa perilaku memilih berdasarkan aris primordial yang mengarah terhadap loyalitas agama, daerah, dan suku (Geertz, 1992; Kuper, 1992).

Dari beberapa gambaran di atas adalah penggunaan simbol-simbol adat seperti marga terkesan politis karena bersangkutan dengan kepentingan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok (Marbun & Silas, 2022). Hal ini dapat dikatakan kontra produktif jika dikaitkan dengan nilai luhur hakiki adat budaya warisan leluhur. Pemberian atau penggunaan simbol adat tersebut tidak dapat dipandang dari satu sisi kepentingan politik sehingga dijadikan sebagai komoditas politik juga komoditas ekonomi. Ada pertimbangan dalam hal menjaga, merawat, serta melestarikan nilai adat budaya sehingga tidak mudah untuk kemudian isu politik tertentu dimanfaatkan dengan menggunakan simbol-simbol adat yang ada.

Mangain (Pemberian Marga) terhadap aktor politik dari Perspektif Etika Politik

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai dimensi etika politik ditinjau dari tradisi pemberian marga terhadap aktor atau tokoh politik. Hal ini menjadi penting untuk kemudian dianalisis mengenai tujuan, sasaran, serta aksi politik yang dilakukan oleh kelompok tertentu serta harapan dengan dilakukannya aksi-aksi tersebut.

Gambar 2. Dimensi Etika Politik dalam Pemberian Marga



Sumber: Olah Data oleh Peneliti (2023)

Pertama, Sarana dimana pada bagian ini berbicara mengenai kemungkinan mencapai politik dimana pada sarana ini aspek moral terletak pada peran etika dalam menguji serta mengkritisi legitimasi keputusan dan praktik politik (Haryatmoko, 2003). Dalam hal sarana, kelompok marga menjadi suatu institusi yang melakukan pemberian marga terhadap aktor politik atau politisi. Sarana atau media dalam pemberian marga berada pada kelompok marga sehingga untuk mencapai tujuan-tujuan marga, kelompok ini menjadi satu tempat yang dapat memberikan legitimasi terhadap pemberian marga kepada seseorang tokoh politik atau aktor politik.

Jika melihat beberapa fenomena diatas, seharusnya kelompok marga mampu mempertahankan independensi dimana Mulyadi & Piradoreko (1998) menyebut bahwa independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, serta tidak tergantung pada orang lain. Dari gambaran diatas, kelompok marga dalam pemberian marga harus kemudian mampu bersikap bebas dari pengaruh atau tidak dikendalikan dalam artian kelompok marga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam kelompok tersebut sehingga untuk kemudian mengambil suatu kebijakan dalam hal ini memberikan marga harus dapat bebas dari pengaruh atau kendali aktor politik atau kepentingan politik sesaat. Sehingga, kelompok marga dapat lepas atau bersikap mandiri terhadap intervensi kepentingan politik.

Kedua, Tujuan dimana pada cakupan tujuan dikatakan mengandaikan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat atau kelompok tertentu. Aspek moral yang kemudian dilihat adalah terletak pada kemampuan dalam menentukan arah yang jelas terhadap satu

kebijakan yang diambil. Jika ditelaah dari sisi politis dari pemberian marga, kepentingan politik kelompok marga, popularitas, serta kebanggaan marga menjadi tujuan dalam pemberian marga. Pada data terkait pemberian marga terhadap aktor tertentu yang telah dibahas pada latar belakang, beberapa pemberian marga terkesan politis karena dibarengi dengan dukungan terhadap pasangan calon tertentu. Jika dikaitkan dengan pemberian marga maka tentu terdapat kepentingan yang diharapkan dari tindakan tersebut. Informan penelitian mengatakan selain kepentingan tentu adanya kebanggaan tersendiri ketika figur politik memakai marga tertentu.

Tujuan yang diharapkan dengan melaksanakan pemberian marga yang berangkat dari perspektif tradisi dan nilai-nilai luhurnya adalah menciptakan kelompok marga yang berintegritas, independen, serta konsisten untuk mempertahankan tradisi luhur dalam setiap pengambilan suatu keputusan atau kebijakan yang lepas dari intervensi atau kepentingan politik sesaat. Hal ini kemudian berdampak kedepan terhadap satu kelompok misalnya tidak “sembarang” dalam memberikan marga terhadap seseorang dikarenakan hal ini tentu dengan pertimbangan nilai luhur. Informan mengatakan bahwa beberapa kelompok bahkan sangat berat untuk memberikan marga terhadap seseorang karena hal ini berlaku panjang artinya beban moral dari pemberian marga tersebut harus dapat teruji dan dapat dipertanggung jawabkan kedepan mengingat nama atau identitas marga yang disandang oleh seseorang diharapkan termanifestasi dari sikap individu itu dalam kehidupan sehari-harinya.

Ketiga, Aksi Politik dalam hal ini bahwa kelompok marga memegang peran dalam penentuan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dalam keutamaan atau kualitas moral. Tindakan politik dalam hal ini memiliki orientasi situasi dan paham permasalahan yang dihadapi. Pemberian marga sebagai suatu bentuk aksi yang mana hal ini dikatakan dalam kemampuan dalam mempersepsi kepentingan yang dipertaruhkan sehingga disposisi kekuasaan tersebut membantu mengkalkulasi kemampuan dan dampak dari aksi politik ini.

Dari tujuan yang sudah dipaparkan diatas, aksi yang seharusnya dipertimbangkan adalah perspektif tradisi atau budaya dalam hal ini memberikan marga terhadap seseorang bukan hanya didasarkan pada kepentingan elektoral atau kepentingan politik suatu kelompok marga. Informan diawal mengatakan bahwa hari-hari ini, terjadi pergeseran dimana kelompok marga justru berlomba untuk memberikan marga terhadap seseorang. Namun ditambahkan bahwa orang yang diberi marga lebih ditentukan oleh status sosial atau jabatan-jabatan struktural seseorang dalam suatu lingkup pemerintahan. Hal ini tentu mengabaikan aspek keadilan dan juga akuntabilitas dalam pemberian marga itu menjadi satu hal yang dipertanyakan tentang kepentingan apa yang ditujukan dari tindakan tersebut.

Pada beberapa fenomena di atas, eksistensi dari seorang tokoh cenderung mengalami pergeseran nilai sebab ketokohan terhadap seseorang lebih cenderung di lihat dari status sosial atau jabatan politik di pemerintahan. Hal itu tentunya tidak mempunyai korelasi secara linear dengan kapasitas, kapabilitas, kredibilitas seseorang ditinjau dari sisi adat. Ini juga menggambarkan bahwa *grade* ketokohan seseorang tidak berkorelasi dengan jabatan politik seseorang sehingga pemberian marga tentu harusnya dikaji lebih dalam dari nilai luhur tradisi itu bukan hanya sekedar berbicara dengan kepentingan politik yang ada didalamnya. Pernyataan tersebut tentu berkaitan erat dengan kesakralan dari tradisi tersebut sehingga pertimbangan yang dilakukan harus dianalisis secara mendalam.

Terlepas dari perdebatan bahwa rangkaian proses yang sudah sesuai dengan tradisi yang ada dimana informan penelitian mengatakan bahwa selama proses itu dilalui sebenarnya tidak ada permasalahan yang begitu berarti. Namun, peneliti memandang dari sisi etika politik bahwa kemudian pemberian marga tersebut terkesan politis mengingat pemberian marga kepada aktor politik lebih didasari kepada kepentingan politis sesaat. Hal itu dapat dilihat misalnya pada fenomena dukungan terhadap calon Walikota Tangerang Selatan dan calon Gubernur Riau dimana secara terang-terangan kelompok marga tertentu memberi dukungan terhadap calon dengan ditambah proses pemberian marga. Hal ini, jika melihat apa yang disampaikan oleh informan bahwa pemberian marga itu adalah sesuatu tradisi luhur sehingga perlu pertimbangan matang untuk kemudian melakukan atau melaksanakan tradisi itu.

Ditambahkan oleh informan penelitian bahwa dalam suatu proses pemberian marga setelah marga diberikan melalui wali atau orang tua yang mengangkat atau memberikan marga, maka individu itu harus kemudian dimasukkan kedalam satu silsilah marga yang didapatnya. Hal ini tentu sebagai bentuk tanggung jawab oleh marga yang memberi terhadap individu yang diberi marga karena diawal pembahasan dijelaskan bahwa setelah sah memperoleh marga maka seseorang memperoleh hak dan kewajiban yang sama dimata adat. Selanjutnya, seringkali diujungnya pada akhirnya setelah kepentingan politis seorang aktor atau kelompok marga tercapai sering kali marga tersebut lambat laun menghilang sehingga dapat dikatakan pemberian marga tersebut hanya suatu proses biasa dikarenakan ada kepentingan politis yang tidak terlihat dibelakang ikut menyertai proses pemberian marga tersebut. Maka, dari sisi pandangan penulis hal ini seakan-akan mengabaikan nilai-nilai luhur yang telah ada dalam suatu tradisi adat tersebut. Bersamaan dengan pandangan tersebut, etika politik dari pemberian marga tadi seharusnya didasarkan atas suatu pertimbangan matang sehingga proses pemberian marga bukan hanya didasari oleh kepentingan politis melainkan kelayakan yang benar-benar dapat diberikan kepada seorang individu.

KESIMPULAN

Pemberian marga (*Mangain*) merupakan sesuatu tradisi yang sakral didasari oleh nilai-nilai luhur sehingga perlu pertimbangan yang matang untuk melaksanakan tradisi tersebut. Fenomena pemberian marga terhadap aktor politik atau politisi lebih didasari oleh kepentingan politis sekelompok marga dengan memanfaatkan sarana kelompok marga dimana politisi dapat mengagresi kepentingan elektoralnya. Tujuan dari pemberian marga lebih didasari kepada kepentingan politis seperti tercapainya kepentingan kelompok marga, popularitas marga yang semakin dikenal, dan kebanggaan terhadap kelompok marga mengingat status sosial yang dimiliki oleh aktor politik tersebut. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dilakukan aksi politik dengan pemberian marga terhadap aktor atau politisi tersebut. Tidak ada persoalan jika melihat dari tradisi dan tata cara pemberian marga namun jika melihat fenomena bahwa pemberian marga terkesan politis hal itu tentu memerlukan suatu pertimbangan yang matang bukan didasari oleh kepentingan politik sesaat.

REFERENSI

Buku & Jurnal

- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68–79. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.363>
- Atmawarni, Kusuma, S., & Marbun, S. (2022). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERIAN MARGA DALAM ADAT SUKU BATAK TOBA DI DESA LIANG JERING KECAMATAN TANAH PINEM KABUPATEN DAIRI. *Journal of Education Technology and Civil Literacy*, 3(1), 9–12.
- Azhar, A. A. (2017). *Pencitraan Politik Elektoral Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat*. Atap Buku.
- Geertz, C. (1992). *Kebudayaan dan Agama*. Kanisius Press.
- Handoyo, E., Susanti, H. M., & Munandar, A. (2016). *ETIKA POLITIK (II)*. Widya Karya.
- Haryatmoko. (2003). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Penerbit Buku Kompas.

- Hasan, I., Adnan, & Kango, A. (2022). MARGA SEBAGAI SIMBOL KEKERABATAN: Studi Pergeseran Status Sosial Warga Barakati, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. *TADAYYUN: Journal of Religion, Social and Humanities Studies*, 1(1), 64–73.
- Hutabalian, R. E. (2014). *MAKNA PEMBERIAN MARGA DALAM ADAT BATAK TOBA (Studi Kasus kepada Perantau Batak Toba di Surabaya)*. Universitas Airlangga.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Paradigma.
- Kuper, A. (1992). *Culture*. Harvard University Press.
- Lynch, G. (2015). Ethnic Politics. In *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism* (pp. 1–5). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118663202.wberen453>
- Manurung, S. F. T. (2010). *Marga sebagai Kekuatan Politik (Studi Penabalan Marga Silaban Desa Silaban dalam Politik di Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasudutan)*. Universitas Sumatera Utara.
- Marbun, K. N., & Silas, J. (2022). Modalities and Identity Politics of The Marbun Clan In Humbang Hasundutan Regency. *International Journal of Social Sciences Review*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.57266/ijssr.v3i1.90>
- Mulyadi, & Puradirejo, K. (1998). *Auditing*. Salemba Empat.
- Pane, H. T., & Yasir. (2020). KOMUNIKASI TRADISI MANGAIN MARGA DALAM PERNIKAHAN BATAK TAPANULI SELATAN DI PEKANBARU. *JOM FISIP*, 7(II).
- Parapat, H. L., & Aritonang, R. D. (2019). NILAI BUDAYA LOKAL “ PEMBERIAN MARGA” DI DESA PARINGGONAN DALAM PRESPEKTIF SEMANTIK SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA. *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 4(2).
- Sinaga, H. L., Sauni, H., & Hartian. (2014). *EKSISTENSI PEMBERIAN MANGAIN MARGA BAGI LAKI-LAKI DI LUAR BATAK TOBA DALAM PRAKTIKNYA DI KOTA BENGKULU*. Universitas Bengkulu.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suseno, M. F. (1994). *Etika Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Thompson, D. (2000). *Etika Politik Pejabat Negara*. Yayasan Obor Indonesia.
- Windi, D. (2021). *Mangain Marga (Pemberian Marga kepada Orang Non Batak dalam Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Dumai)*. Universitas Sumatera Utara.

Sumber Online

- bermadah. (2018, April 15). *Dapat Dukungan dari Keluarga Toga Simamora, Andi Rachman Diberi Marga Purba*. <https://bermadah.co.id/berita/detail/dapat-dukungan-dari-keluarga-toga-simamora-andi-rachman-diberi-marga-purba>
- DE1 FM. (2022, November 28). *Mangain, Tradisi Pemberian Marga Bagi Seorang Yang Bukan Batak - Del FM*. <https://www.radiodelfm.co.id/mangain-tradisi-pemberian-marga-bagi-seorang-yang-bukan-batak/>
- detikNews. (2011, January 20). *Budayawan Batak: Tak Mudah Beri Marga dan Gelar ke Seseorang*. <https://news.detik.com/berita/d-1550351/budayawan-batak-tak-mudah-beri-marga-dan-gelar-ke-seseorang>
- detiknews.com. (2009, June 18). *Prabowo Sandang Marga Lumban Tobing*. <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-1149989/prabowo-sandang-marga-lumban-tobing>
- lampuhijau.co.id. (2020, November 7). *Diberi Marga Ginting, Calon Wali Kota Tangsel Muhammad Didukung Masyarakat Karo - Lampu Hijau*. <https://lampuhijau.co.id/baca-berita/political-news/5990/diberi-marga-ginting-calon-wali-kota-tangsel-muhamad-didukung-masyarakat-karo>
- liputan6.com. (2022a, September 27). *Ungkapan Rasa Bangga AHY Jadi Bagian Keluarga Besar Marga Simanjuntak - Regional Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/5081737/ungkapan-rasa-bangga-ahy-jadi-bagian-keluarga-besar-marga-simanjuntak>
- liputan6.com. (2022b, November 26). *Erick Thohir Diberi Marga Sidabutar, Sah Jadi Orang Batak - Regional Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/5136870/erick-thohir-diberi-marga-sidabutar-sah-jadi-orang-batak>
- republika.co.id. (2020, September 18). *Kunker ke Kabupaten Karo, Ketua DPD Diberi Marga Sitepu | Republika Online*. <https://sindikasi.republika.co.id/berita/qgtavt327/kunker-ke-kabupaten-karo-ketua-dpd-diberi-marga-sitepu>
- suarakarya.id. (2021, April 10). *Advokat Dan Politisi Golkar Henry Indraguna Diberi Gelar Marga Purba - Suara Karya*. <https://www.suarakarya.id/politik/pr-2601699436/Advokat-Dan-Politisi-Golkar-Henry-Indraguna-Diberi-Gelar-Marga-Purba>
- tagar.od. (2017, April 2). *Viktor: Tidak Etis, Mengatasnamakan Suku Mendukung Pasangan Calon Tagar*. <https://www.tagar.id/viktor-tidak-etis-mengatasnamakan-suku-mendukung-pasangan-calon>



tribunnews.com. (2017, November 26). *Jokowi Ungkapkan Isi Hatinya Setelah Resmi Menjadi Marga Siregar* - *Tribunjogja.com*. <https://jogja.tribunnews.com/2017/11/26/jokowi-ungkap-isi-hatinya-setelah-resmi-menjadi-marga-siregar>